Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi IV
Minggu ke-5 Januari
(26 Januari s.d. 1 Februari 2023)
2023

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERLUNYA SATU DATA PANGAN

Sri Nurhayati Qodriyatun
Analis Legislatif Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Beberapa tahun lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) mengeluarkan data luas sawah yang dikoreksi dari semula 7,79 juta ha (2013) menjadi 7,1 juta ha (2018). Berkurang hampir 700.000 ha. Hal ini menyebabkan Kementerian Pertanian (Kementan) harus mengoreksi semua programnya termasuk salah satunya subsidi pupuk. Bahkan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus menghadapi protes para petani karena jatah pupuk subsidi berkurang. Kemudian masalah minyak goreng yang tiba-tiba tidak terkendali harganya karena tidak adanya data yang akurat soal luas lahan perkebunan sawit dan data kebutuhan bulanan dan tahunan minyak sawit dalam negeri. Terakhir, impor beras 500.000 ton oleh Perum Bulog pada akhir tahun 2022 hingga 16 Februari 2023, mundur dari target awal yaitu selesai pada akhir Januari 2023. Kebijakan yang diambil Bulog tersebut karena menurut Bulog cadangan beras pemerintah diperkirakan tidak akan mencukupi kebutuhan beras nasional dan akan menimbulkan gejolak harga di masyarakat. Padahal di waktu bersamaan, Kementan menyatakan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman dengan menyodorkan data stok beras yang berbeda dengan data Bulog. Berikut contoh lain perbedaan data mengenai pangan antara Kementan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Komoditas Pangan	Konsumsi/ kapita (kg)		Total kebutuhan (ton)		Produksi menurut Kementan (ton)		Produksi menurut BPS (ton)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Beras	111,58	114,6	-	-	31,36 juta	31,33 juta	31,5 juta	31,36 juta
Daging sapi/kerbau	2,53	2,56	681.180	696.956	404.997	473.814	471.944,39	458.755,52
Daging ayam ras	10,1	11,75	2,72 juta	3,2 juta	3,22 juta	4,03 juta	3,22 juta	3,43 juta
Telur ayam ras	18,35	18,61	4,95 juta	5,07 juta	5,14 juta	5,1 juta	5,14 juta	5,16 juta

Sumber: Bisnis Indonesia, 30 Januari 2023

Permasalahan beda data pangan di Indonesia berdampak terhadap rencana kebijakan pangan yang akan diambil. Perlu dicari solusi agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan pangan yang akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional dan kedaulatan pangan. Ada beberapa kementerian dan lembaga (K/L) penyedia data pangan, yaitu Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selama ini masing-masing K/L menyediakan data yang berbeda-beda yang menjadi dasar masing-masing K/L mengeluarkan kebijakan. Karena belum terbangunnya koordinasi antar K/L seringkali kebijakan yang dikeluarkan kurang tepat.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, terstandar, mutakhir, dan terintegrasi. Termasuk di dalamnya satu data tentang pangan. Bappenas pada akhir tahun lalu merilis portal "Satu Data Indonesia". Nantinya data tentang pangan, akan bermuara pada satu portal ini. Saat ini tercatat sudah ada 58 portal K/L, 69 portal provinsi, dan 18 portal kabupaten/kota yang sudah terhubung dengan portal Satu Data Indonesia.

Satu data pangan sangat diperlukan untuk menjadi satu-satunya sumber pijakan K/L terkait pangan dalam menyusun kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain: penentuan luasan dan lokasi lahan untuk pembangunan lumbung pangan (*food estate*), komoditas yang akan diproduksi, infrastruktur yang harus disiapkan, diversifikasi pangan yang akan dilakukan, harga pangan yang akan ditetapkan, dan kebijakan perlu tidaknya impor pangan. Dengan terbangunnya satu data pangan, kebijakan pangan dapat diarahkan tidak hanya menuju ketahanan pangan, tetapi juga kedaulatan pangan.

Bapanas sangat berperan dalam mengoordinasikan penyediaan data dari berbagai K/L terkait pangan. Saat ini, Bapanas baru membentuk Tim Satu Data Beras yang bertugas mensinkronisasikan data beras nasional agar tidak terjadi polemik antar K/L dalam menetapkan kebijakan beras. Tim ini menyepakati penggunaan satu data BPS terkait produksi beras, kebutuhan beras rumah tangga dan luar rumah tangga. Ke depannya, Bapanas juga harus mensinkronkan data terkait pangan lainnya agar pembangunan pangan lebih terarah sehingga terwujud ketahanan dan kedaulatan pangan.

Atensi DPR

Pengembangan satu data pangan penting bagi kebijakan pangan. DPR RI melalui Komisi IV perlu mendesak Bapanas untuk segera membangun satu data pangan nasional untuk menghindarkan kembali terjadinya kebijakan pangan yang tidak sinkron antar-K/L terkait pangan dan merugikan petani dan masyarakat. Dalam membangun satu data pangan, Bapanas harus melakukan koordinasi dengan berbagai K/L terkait pangan sehingga tidak lagi terjadi perbedaan data antar-K/L. Selain itu, Komisi IV pun perlu mendorong agar K/L terkait seperti Kementan, KKP, serta Bulog menggunakan satu data pangan tersebut untuk acuan dalam meluncurkan kebijakannya. Seperti kebijakan dalam membangun lumbung pangan oleh Kementan dan kebijakan impor beras oleh Bulog.

Sumber

antaranews.com, 31 Januari 2023;
Bisnis Indonesia, 30 Januari 2023;
cnbcindonesia.com, 30 Januari 2023;
dpr.go.id, 31 Januari 2023;
kompas.com, 31 Januari 2023;
republika.co.id, 31 Januari 2023.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023